



Membiayai perekonomian rendah karbon Indonesia



Kredit foto: ICCTF

Pemerintah Indonesia baik secara mandiri maupun dengan dukungan bilateral dan multilateral saat ini, tidak akan dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk bergerak secara cepat dan transformatif menuju ekonomi rendah karbon. Modal swasta, domestik dan asing, serta pembiayaan campuran (*smart blended financing*) dibutuhkan, terutama untuk investasi dalam infrastruktur berkelanjutan yang akan mendukung transisi tersebut. Pengaturan mekanisme tata kelola dan partisipasi yang memungkinkan pengarusutamaan kebijakan rendah karbon untuk menciptakan kebijakan yang jelas dan stabil dibutuhkan agar dapat menarik dan memandu pembiayaan dari sektor swasta.

Laporan LCDI menunjukkan bahwa rata-rata total investasi untuk jalur pembangunan rendah karbon ditaksir senilai USD 21,9 miliar per tahun untuk periode 2020-2024, atau setara dengan 1,7% PDB Indonesia. Setelah itu, hingga tahun 2045, investasi yang diperlukan untuk pembangunan rendah karbon diperkirakan sekitar 2,3% dari PDB.

Pembangunan rendah karbon memerlukan rasio investasi terhadap PDB yang rendah, jika dibandingkan dengan bisnis seperti biasa. Dengan kata lain, perekonomian rendah karbon akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan investasi yang lebih kecil.

Terakhir, tetapi tentu tidak kalah pentingnya, kebijakan dan intervensi pembangunan rendah karbon harus berupaya mengurangi jumlah individu yang mungkin terkena dampak negatif dari pergeseran Indonesia ke perekonomian rendah karbon, khususnya para pekerja dan masyarakat yang bertumpu pada sektor ekonomi tinggi karbon dan pada kegiatan yang menggerus sumber daya alam Indonesia. Mereka akan membutuhkan dukungan dalam membangun kemampuan dan menggapai peluang baru yang muncul untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari perekonomian rendah karbon. Hanya dengan memastikan transisi yang adil, Indonesia dapat sepenuhnya menyadari manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh perekonomian rendah karbon.



Tentang laporan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (*Low Carbon Development Indonesia LCDI*)

Laporan ini disusun berdasarkan hasil analisis melalui proses teknokratis yang dikoordinasikan oleh BAPPENAS dan mendukung penyusunan RPJMN 2020-2024. Laporan ini mencakup kontribusi dari para mitra, antara lain: World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia), Global Green Growth Institute Indonesia (GGGI), KnowlEdge Sri, dan New Climate Economy (NCE) dan mitra - kemitraan ini disebut sebagai Kemitraan NCE-LCDI. Lembaga-lembaga lain yang juga berkontribusi terhadap LCDI dan proses penyusunan RPJMN adalah: International Institute for Applied System Analysis (IIASA), World Agroforestry (ICRAF), System Dynamics Bandung Bootcamp, Sarana Primadata Group (SPD), dan United Nations Development Programme (UNDP).

Selain itu, laporan ini juga didukung oleh Departemen Pembangunan Internasional (DFID) Inggris melalui UK Climate Change Unit in Indonesia (UKCCU), Pemerintah Norwegia, Pemerintah Denmark, dan Pemerintah Jerman.



LOW CARBON DEVELOPMENT INDONESIA

Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Perekonomian Hijau di Indonesia

MENUJU PEREKONOMIAN INDONESIA YANG KUAT, ADIL, DAN RENDAH KARBON

Paradigma baru

Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam dua dekade terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia berhasil menurunkan hingga separuh kemiskinan ekstrem. Saat ini, kurang dari 10% penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan ekstrem. Dengan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,6% per tahun dari tahun 2000 hingga 2018, pendapatan per kapita pun meningkat dua kali lipat. Namun, pendekatan yang saat ini ditempuh untuk pembangunan Indonesia tidak dapat dilanjutkan. Eksploitasi sumber daya alam, serta investasi untuk sumber energi yang tidak efisien dan menghasilkan karbon tinggi, telah membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jika pendekatan pembangunan yang sama dilanjutkan, berarti kita akan terus merusak sumber daya alam kita, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, menutup kesempatan penciptaan lapangan kerja, dan menghambat upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Pemerintah Indonesia bertekad untuk mentransformasikan perekonomian nasional yang kemajuannya tidak hanya diukur oleh pertumbuhan PDB, melainkan juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial.

Manfaat langsung dan nyata

Pertumbuhan rendah karbon dalam jangka panjang mampu menghasilkan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 6% per tahun hingga 2045. Angka PDB tersebut lebih tinggi daripada yang dapat dihasilkan dari jalur bisnis seperti biasa (*business-as-usual*) yang diterapkan saat ini. Pelaksanaan pembangunan rendah karbon yang inklusif tersebut tercantum dalam laporan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (atau *Low Carbon Development Initiative/LCDI*), yang akan diinternalisasikan ke dalam rencana pembangunan lima tahun Indonesia (RPJMN) berikutnya. RPJMN tersebut akan menjadi rencana pembangunan rendah karbon pertama di Indonesia. Laporan LCDI menunjukkan bahwa jalur pembangunan rendah karbon dapat menghasilkan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan (lihat Gambar 1).

Indonesia tidak harus menunggu untuk menikmati manfaat-manfaat tersebut. Laporan LCDI menunjukkan bahwa setelah 2019, pelaksanaan pendekatan bisnis seperti biasa akan mulai tertinggal di belakang pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, jelas bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan rendah karbon menguntungkan semua pihak dan menjadi solusi *win-win-win* untuk perekonomian Indonesia, untuk rakyatnya, dan lingkungan lokal dan global.

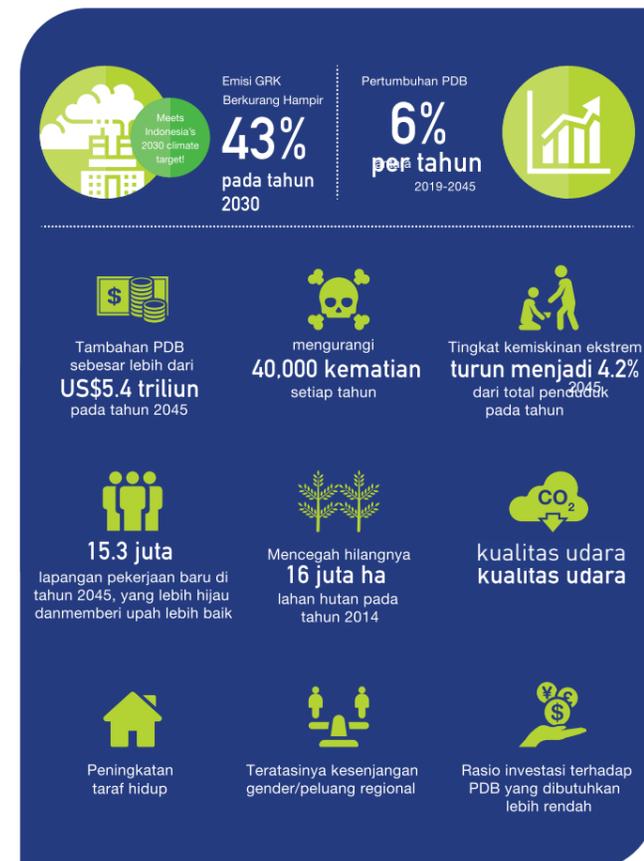
Laporan LCDI juga menemukan bahwa investasi untuk proyek batu bara tidak lagi ekonomis. Saat ini, 66% dari total pasokan energi Indonesia berasal dari batu bara, gas, dan minyak. Namun, jika kita menghitung biaya akibat polusi udara, energi baru terbarukan menjadi lebih kompetitif dari segi biaya dibandingkan dengan biaya proyek-proyek batu bara baru (lihat Gambar 2). Biaya energi terbarukan turun dengan cepat dan akan terus turun seiring dengan tercapainya skala ekonomis di Indonesia. Energi terbarukan dengan cepat akan menjadi pembangkit listrik termurah di Indonesia, bahkan tanpa mempertimbangkan biaya polusi udara di tingkat lokal. Peningkatan sebaran energi terbarukan, dengan bauran hingga 30% di tahun 2045 sebagaimana direkomendasikan dalam laporan LCDI, akan menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Dengan menempuh jalur pembangunan rendah karbon, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, pencapaian kesehatan masyarakat, serta pemenuhan standar kehidupan yang lebih baik bagi penduduknya.

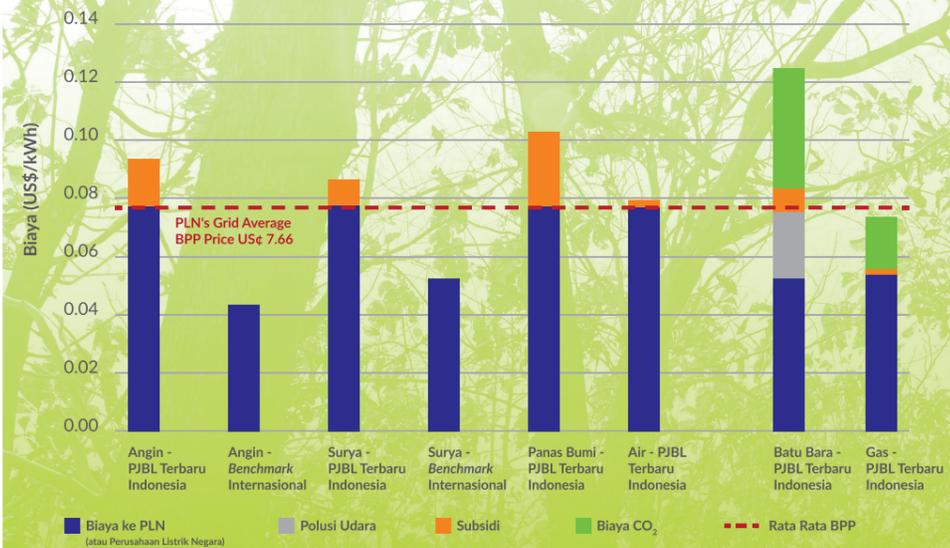
Sebagai negara anggota G20 dan penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tertinggi ke-4 di dunia, upaya yang ditempuh Indonesia tidak hanya berdampak pada penduduk Indonesia, tetapi juga pada penduduk di seluruh dunia. Dengan dukungan masyarakat internasional, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sembari mengurangi intensitas karbon dan energi. Kesempatan ini dapat mengantarkan Indonesia untuk mengurangi emisi GRK-nya hingga 43% di tahun 2030, melampaui target iklim bersyarat (*conditional*) yang ditetapkan Indonesia. Di saat bersamaan, pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan akan dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 4,2% dari total populasinya dan menghindari 40.000 kematian setiap tahunnya.

Indonesia akan mampu merengkuh pertumbuhan ekonomi dan sosial, sembari melestarikan kekayaan sumber daya alam keanekaragaman hayati. Inilah kisah pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di abad ke-21.

GAMBAR 1: PERUBAHAN PARADIGMA: MANFAAT JALUR PERTUMBUHAN RENDAH KARBON INDONESIA (SKENARIO PRK -TINGGI DIBANDINGKAN DENGAN ASUMSI DASAR)



GAMBAR 2: BIAYA RELATIF BATU BARA DAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN



Di sektor lahan, Indonesia telah menempuh langkah-langkah penting untuk perbaikan pengelolaan sumber daya hutan. Pada bulan September 2018, Presiden Indonesia menandatangani moratorium izin perkebunan kelapa sawit baru dan memerintahkan peninjauan pada perkebunan yang saat ini ada. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi munculnya sektor jasa lingkungan baru serta menerbitkan peraturan mengenai layanan pariwisata di hutan, perhutanan sosial, dan produk hutan non-kayu. Kabar baiknya adalah, di tahun 2018 terjadi penurunan laju deforestasi hutan yang signifikan di hutan primer Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di laporan LCDI, Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan produktivitas lahan perkebunan, meningkatkan pendapatan dan ketahanan petani terhadap ancaman perubahan iklim, serta mengurangi emisi dari penggunaan lahan.

Sektor energi dan lahan, jika digabung, menyumbang 80% emisi GRK Indonesia, sehingga laporan LCDI berfokus pada dua bidang penting ini. Namun, pada praktiknya, dalam perekonomian rendah karbon semua sektor saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Termasuk di dalamnya adalah perkotaan, dimana penduduk berpindah tempat, bernafas, dan bekerja, dan perindustrian, yang harus mengembangkan solusi-solusi berkelanjutan di dunia yang sumber dayanya terbatas. Seperti halnya untuk energi dan perkotaan, insentif-insentif sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mendorong perubahan sektor-sektor tersebut sangat diperlukan.

Kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan yang lebih baik

Mewujudkan visi yang lebih makmur dan berkelanjutan bagi Indonesia memerlukan serangkaian kebijakan dan intervensi yang memberikan insentif dan sinyal yang jelas bagi bisnis dan investor. Serangkaian kebijakan tersebut mencakup:

- **Mempercepat transisi menuju sumber energi terbarukan dan menjauh dari batu bara:** Secara khusus, menaikkan porsi bauran energi terbarukan menjadi 30% pada 2045.
- **Meningkatkan efisiensi energi.** Secara khusus, intensitas energi (rasio permintaan energi dengan PDB) diturunkan menjadi rata-rata 3,5% per tahun hingga 2045.
- **Pelaksanaan menyeluruh moratorium izin kehutanan, sawit, tambang, dan lahan gambut.** Hutan primer, lahan gambut, dan mangrove dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendukung keanekaragaman hayati, dan menyerap emisi karbon.
- **Meningkatkan target reforestasi menjadi lebih dari tiga kali lipat,** mencapai lebih dari 1 juta hektar per tahun pada tahun 2024.
- **Meningkatkan komitmen untuk mencapai target terkait air, perikanan, dan keanekaragaman hayati,** sebagaimana ditetapkan oleh Target Aichi, Protokol Nagoya, Konvensi Keanekaragaman Hayati, dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP*) 2015-2020.
- **Meningkatkan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun,** sehingga mendorong petani Indonesia untuk menanam lebih banyak pangan untuk lebih banyak penduduk, dengan sumber daya dan lahan yang lebih sedikit.

Dampak yang dapat dihasilkan dari gabungan kebijakan dan intervensi di atas termasuk: peningkatan produktivitas tenaga kerja; peningkatan efisiensi ekonomi; peningkatan produktivitas pertanian; percepatan kemajuan teknologi terkait energi terbarukan; dan peningkatan pasokan dan mutu barang dan jasa ekosistem.

Kebijakan, intervensi, dan pendanaan yang tepat perlu disertai dengan penyesuaian dalam desain kelembagaan Indonesia, termasuk perubahan pola pikir. Dengan demikian, pendekatan baru dalam hal tata kelola diperlukan untuk mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian nasional dan regional, sektor swasta dan komunitas keuangan domestik dan internasional; serta menentukan metode untuk menyelaraskan kebijakan dan membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.

Lebih lanjut, dengan kebijakan yang lebih ambisius, Indonesia dapat mempertahankan penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka panjang, sehingga pada tahun 2045, emisi gas rumah kaca diproyeksikan akan turun hampir 75% dibandingkan data baseline. Kebijakan-kebijakan tersebut membutuhkan transformasi struktural dalam pembangunan Indonesia, dengan kapabilitas institusi dan teknis yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini.